

**DAMPAK KORUPSI, PAJAK DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

KRISTO JOSUA NAIBAHO

NIM/BP. 1202757/2012

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

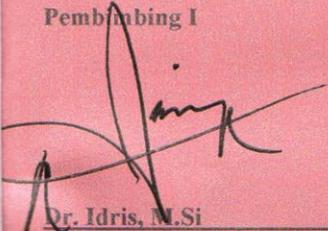
PERSETUJUAN SKRIPSI

**DAMPAK KORUPSI, PAJAK DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

Nama : Kristo Josua Naibaho
BP/NIM : 2012/1202757
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2018

Pembimbing I

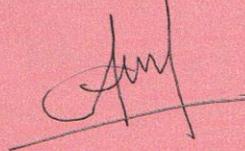


Dr. Idris, M.Si
NIP. 196107031985031005

Mengetahui Oleh



Pembimbing II



Ariusni, SE, M.Si
NIP. 197703092008012011

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi

Drs. Ali Anis, MS
NIP. 195911291986021001

PENGESAHAN SKRIPSI

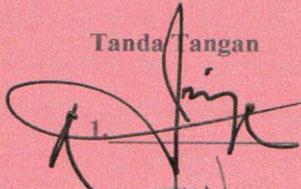
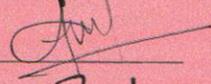
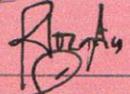
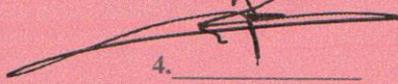
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**DAMPAK KORUPSI, PAJAK DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

**Nama : Kristo Josua Naibaho
BP/NIM : 2012/1202757
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Februari 2018

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Idris, M.Si	1. 
2. Sekretaris	: Ariusni, SE, M.Si	2. 
3. Anggota	: Melty Roza Adry, SE, ME	3. 
4. Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristo Josua Naibaho
Nim/ Tahun Masuk : 1202757/2012
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Pakan, 11 Maret 1994
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Monang, Blok F No.13 – ATB Padang
No. Hp/Telp : 085272243281
Judul Skripsi : Dampak Korupsi, Pajak dan Belanja Modal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis/ skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Februari 2018
Yang Menyatakan



Kristo Josua Naibaho
1202757/2012

ABSTRAK

Kristo Josua Naibaho, 2012/1202757 : Dampak Korupsi, Pajak dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Skripsi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Bapak Dr. Idris, MSi dan Ibu Ariusni, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak Korupsi, pajak dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dimana penulis menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Korupsi, pajak dan belanja modal, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data time series dan data cross section. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi, dari tahun 2011-2015. Teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif mencakup 1) Uji Chow 2) Uji Hausman 3) Analisis Regresi Panel, hasil penelitian jatuh pada metode FEM. Untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan 1) Uji t dan 2) Uji f dengan taraf $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh yang negatif namun tidak signifikan antara Korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (4) Terdapat pengaruh yang signifikan antara Korupsi, pajak dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sehubungan dengan hasil penelitian, maka saran yang direkomendasikan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yakni dengan mengoptimalkan penerimaan pajak serta belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah dan memberantas kasus Korupsi yang ada di Indonesia, sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Korupsi, Pajak dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi khususnya kajian ekonomi publik serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terealisasinya skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Idris, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Ariusni, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku ketua dan Ibu Melti Roza Adry, SE, M.E selaku sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Melti Roza Adry, SE, M.E dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku penguji skripsi.

4. Bapak dan Ibu staf pengajar serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan proses administrasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Teristimewa penulis persembahkan kepada orang tua tercinta serta keluarga dan orang-orang yang penulis sayangi, yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Eonomi Universitas Negeri Padang.
6. Rekan-rekan se-angkatan 2012 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS.....	13
A. Kajian Teori	13
1. Pertumbuhan Ekonomi	13
2. Korupsi	16
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Variabel Penelitian	36
F. Defenisi Operasional.....	37
G. Teknik Analisis Data	38
1. Analisis Deskriptif	39
2. Analisis Induktif	39
a. Model Regresi Panel.....	39
b. Pemilihan Model	41
c. Uji Asumsi Klasik.....	43
d. Pengujian Hipotesis	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	49
2. Deskriptif Variabel Penelitian	53
3. Analisis Induktif	64
4. Uji Asumsi Klasik.....	70
5. Langkah Perbaikan Uji Asumsi Klasik	72
6. Koefisien Determinasi (R^2).....	74
7. Pengujian Hipotesis	75
8. Uji F.....	76
B. Pembahasan.....	77
1. Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	77
2. Dampak Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	80
3. Dampak Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Corruption Perception Index (CPI) Beberapa Negara di Asean Tahun 2011-2015.....	4
Tabel 2 Realisasasi pendapatan Pajak Daerah dan Belanja Modal di Indonesia Tahun 2010-2015	8
Tabel 3 Klasifikasi Nilai d (Durbin Watson).....	45
Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk Indonesia Tahun 2005-2015.....	51
Tabel 4.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi Atas Dasar Harga Konstan (2010) 2011-2015 (Persen).....	54
Table 4.3 Korupsi di Indonesia berdasarkan Pengaduan Masyarakat Tahun 2011-2015	57
Table 4.4 60Penerimaan Pemerintah Sektor Pajak di Indonesia Tahun 2011-2015 (dalam ribu rupiah)	60
Table 4.5 Belanja Modal di Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011-2015 (dalam ribu rupiah)	63
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Common Effect Model.....	64
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	65
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Random Effect Model	66
Tabel 4.9 Chow-Test	68
Tabel 4.10 Uji Hausman	69
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolienaritas (correlation matrix).....	71
Tabel 4.13 Uji Glejser.....	71
Tabel 4.14 Hasil Estimasi Regresi Cross-Section Weight.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia (dalam persen) Tahun 2010-2015	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Kerangka Konseptual	33

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang selalu berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya agar tidak tertinggal dengan pembangunan di negara–negara maju. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi atau GDP (*Gross National Product*) menunjukkan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.

Sedangkan Sukirno (2008) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Dibawah ini merupakan gambar 1 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2015



Gambar 1
Pertumbuhan ekonomi Indonesia (dalam persen) Tahun 2010-2015

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai tahun 2010 hingga tahun 2015. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,81% dan tahun 2012 turun menjadi 6,44% hingga tahun 2015 turun menjadi 4,79%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami *trend* negatif dari tahun ke tahun.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa diantaranya investasi, teknologi, tenaga kerja, dan pendidikan. Tetapi dalam

beberapa kasus, sebagian besar peneliti belum melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh korupsi. Korupsi merupakan dampak sosial yang perlu diteliti karena dengan adanya korupsi pertumbuhan ekonomi dapat terpengaruhi.

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi sebagai sebuah fenomena, adalah masalah global dan ada diberbagai tingkat diberbagai Negara. Korupsi menimbulkan tantangan pembangunan yang serius, dan memiliki sejumlah konsekuensi yang merugikan investasi dalam negeri, investasi asing, pada pertumbuhan ekonomi dan pada pengeluaran pemerintah. Korupsi adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Namun, pengukuran korupsi telah tumbuh secara eksponensial. Seperti *Transparence International* (TI), *Corruption Perception Index* (CPI) dan Indikator Tata Kelola Bank Dunia (WGI).

Corruption Perception Index (CPI) merupakan index komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggaraan Negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan Negara lain. Untuk melihat tingkat Korupsi di Indonesia maka dapat dilihat dari besarnya tingkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari angka 1–100; semakin mendekati 100 maka korupsi di negara tersebut semakin kecil (bersih dari korupsi) dan jika semakin mendekati 0 maka korupsi di negara tersebut semakin besar.

Berikut adalah Tabel Corruption Perception Index (CPI) di beberapa Negara ASEAN :

Tabel 1
Corruption Perception Index (CPI) Beberapa Negara ASEAN
Tahun 2011-2015

No.	Negara	IPK score				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Singapura	92	87	86	84	85
2	Malaysia	43	49	50	52	50
3	Thailand	34	37	35	38	38
4	Filipina	26	34	36	38	35
5	Indonesia	30	32	32	34	36
6	Vietnam	29	31	31	31	31
7	Myanmar	15	15	21	21	22

Sumber: *Corruption Perception Index 2015*

Berdasarkan perolehan data dari *Corruption Perception Index 2015*, pada tahun 2011 Indonesia mencatat skor CPI yaitu 30 hingga pada tahun 2015 meningkat dengan perolehan skor 36. Artinya, Korupsi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami *trend* positif. Akan tetapi peningkatan skor CPI di Indonesia masih tergolong rendah dan masih jauh dalam kategori bersih. Artinya tingkat Korupsi di Indonesia masih tergolong pada keadaan tingkat korupsi yang tinggi.

Korupsi merupakan fenomena global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Perdebatan hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi masih berjalan sampai sekarang. Korupsi akan meningkatkan *output* jika suap yang lebih banyak membantu perekonomian menuju pertukaran bebas yang lebih besar. Jadi dalam perekonomian dimana kebebasan ekonomi tinggi dan suap menyebabkan pejabat publik malas dalam mengatur aktivitas perusahaan, maka *output* akan naik. Akan tetapi, korupsi akan

membatasi *output* ketika suap mengurangi kompetisi dan meningkatkan regiditas pasar. Hasil ini lebih memungkinkan terjadi di negara dimana kebebasan ekonomi rendah dikarenakan meluasnya kepemilikan asset oleh negara, adanya monopoli dan tingginya tarif yang diberikan ke pemilik bisnis dengan mengatur para elit dan kroninya. Meningkatnya korupsi di negara yang rendah kebebasan ekonominya berarti rendahnya persaingan dan pertukaran bebas dan membawa ke jatuhnya *output*.

Sementara itu, di Indonesia terdiri dari 33 Provinsi, dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dan juga tingkat korupsi yang berbeda pula antar Provinsi. Menjadi menarik untuk mengetahui apakah korupsi antar provinsi memiliki hubungan dampak yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Swaleheen dan Stansel (2007) korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, ketika pelaku ekonomi memiliki pilihan yang sedikit/kebebasan ekonomi rendah. Korupsi berkontribusi dalam mengurangi pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, mengurangi pajak, membuat pemerintah justru bergandengan dengan para pencari rente daripada melakukan aktivitas yang produktif, dan akhirnya mendistorasi komposisi pengeluaran pemerintah.

Straub (2008) menjelaskan bahwa teori pertumbuhan modern menekankan kemungkinan peran belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya efek langsung peningkatan belanja modal adalah dapat secara langsung mempengaruhi produktivitas faktor-faktor lain yang dapat merangsang peningkatan output ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang berkualitas maka

dapat mengurangi biaya ketergantungan terhadap sektor swasta seperti penyediaan air bersih, listrik, maupun jalan.

Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunnya jumlahnya semestinya relatif besar. Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa proyek fisik menghasilkan *output* berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik.

Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal. Penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan publik merupakan keniscayaan, bukan suatu pilihan.

Dalam era globalisasi ini peranan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi merupakan kunci untuk menuju masyarakat yang lebih makmur, karena itu peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia harus benar-benar aktif dan positif. Masalah di Negara berkembang begitu besar dan masalah itu tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi. Oleh

karena itu tindakan pemerintah benar-benar sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi Negara berkembang.

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk menyelesaikan kegiatan ekonomi tersebut, pemerintah memerlukan dana atau anggaran yang sangat besar, dana tersebut tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Di Indonesia dana atau anggaran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN dapat diketahui berapa rencana dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak berasal dari iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah dan pembebanannya berhubungan dengan aktivitas tertentu (Hyman, 2011). Pajak juga dapat diartikan sebagai pengalihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor pemerintah. Pada umumnya di beberapa Negara, penerimaan pemerintah terbesar berasal dari pajak, seperti di Spanyol, Hungaria, Roma, Inggris, Negara-negara *European Union*, dan Amerika Serikat.

Penerimaan dari pajak pada umumnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Berikut tabel 2 menunjukkan statistik keuangan pemerintah berdasarkan Realisasasi pendapatan Pajak Daerah dan Belanja Modal di Indonesia tahun 2010-2015 :

Tabel 2
Realisasasi pendapatan Pajak Daerah dan Belanja Modal di Indonesia
Tahun 2010-2015

Tahun	Pajak Daerah (Triliun)	Pertumbuhan (%)	Belanja Modal (Triliun)	Pertumbuhan (%)
2010	47,30	20,36	25,33	4,26
2011	62,76	24,63	26,33	3,80
2012	72,98	14,00	29,97	12,14
2013	86,98	16,10	36,57	18,04
2014	103,09	15,63	36,84	0,01
2015	120,33	14,33	57,94	36,42

Sumber : BPS Indonesia, Statistik Keuangan pemerintah provinsi 2010-2015, data diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat realisasasi pendapatan pajak daerah. Secara agregat penerimaan sektor pajak di Indonesia selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 sebesar 47,30 triliun dimana di tahun tersebut terjadi peningkatan Pertumbuhan Pajak Daerah di Indonesia secara keseluruhan sebesar 20,36% dari tahun 2009. Kemudian untuk tahun 2015 naik menjadi 120,33 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 14,33% dari tahun 2014. Artinya Indonesia mempunyai *trend* yang positif melalui penerimaan pajak. Begitu juga dengan belanja modal, pada tahun 2010 sebesar 25,33 triliun dimana di tahun tersebut terjadi peningkatan Belanja Modal secara keseluruhan sebesar 4,26% dari tahun 2009. Kemudian untuk tahun 2015 naik menjadi 57,94 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 36,42% dari tahun 2014. Artinya Indonesia juga mempunyai *trend* yang positif melalui peningkatan belanja modal.

Meningkatnya pendapatan sektor pajak serta belanja modal di Indonesia seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, akan tetapi jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia berbanding terbalik dengan meningkatnya pendapatan Negara melalui sektor pajak serta belanja modal. Pada tahun 2010

sebesar 6,81%, pada tahun 2014 sebesar 5,02% hingga pada tahun 2015 sebesar 4,79%. Hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya masalah sistem birokrasi dalam mengrealisasikan anggaran di Indonesia .

Di kebanyakan Negara sedang berkembang, birokrasi memegang peranan penting, karena pemerintah berperan sebagai pusat seluruh kegiatan kenegaraan dan pembangunan. Sedangkan birokrasi adalah pelaksanaan dari keputusan dan program-program yang dirancangan pemerintah. Jadi birokrasi pada dasarnya merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan efektifitas pencapaian tujuan. Tapi kenyataan yang terjadi di kebanyakan Negara sedang berkembang justru sebaliknya, yaitu inefisiensi, pemborosan dan kebocoran dan yang paling menyolok adalah kasus Korupsi.

Secara umum, bentuk kepentingan pribadi birokrat adalah akumulasi keuntungan ekonomi jangka pendek, walau dalam banyak kasus birokrat juga berkepentingan mempertahankan dan meningkatkan jabatan, atau tujuan-tujuan lainnya. Birokrat akan memanfaatkan sumber daya (berupa kebijaksanaan) untuk memaksimalkan kepentingan pribadi baik dengan “menjual” kebijaksanaan tersebut pada penawar dengan harga tertinggi, atau mengalokasikan sumber daya tersebut pada pihak-pihak tertentu. Jadi, apa yang kita kenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat dipahami sebagai hasil dari pasar nonekonomi yang berfungsi lewat alokasi sumber daya birokratis (Gindle dalam Deliarnov 2006:69).

Widiastuti (2008: 107) mengatakan pada sisi penerimaan pemerintah, pengaruh langsung penerimaan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat

lebih tinggi di Negara yang korupsinya tinggi lebih kecil daripada di Negara yang korupsinya rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa di Negara yang korupsinya tinggi, cenderung penerimaan pemerintah mengandalkan dari dana masyarakat (pajak), sehingga jika penerimaan pemerintah naik, dapat diindikasikan kesejahteraan masyarakat juga naik secara signifikan. Sedangkan di Negara yang korupsinya rendah, penerimaan pemerintah lebih mengandalkan penerimaan Negara dari sisi pemanfaatan sumber daya alamnya.

Huntington (dalam jurnal *the Impact of Corruption on Regime Legitimacy* 2002:408) memiliki pendapat yang berbeda dalam memandang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Huntington mengatakan bahwa korupsi akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mempercepat birokrasi sehingga permasalahan di birokrasi lebih mudah diselesaikan menggunakan uang daripada dengan mengikuti birokrasi yang ada. Korupsi dapat berjalan secara efisien kalau korupsi dijalankan di Negara-negara yang mempunyai birokrasi yang sangat rumit.

Blackburn dkk (2005 1-7) mengatakan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorasi alokasi sumberdaya yang efisien dalam perekonomian. Tetapi sebagian besar para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan.”

Berdasarkan latar belakang masalah serta pendapat para ahli, perlu diteliti untuk melihat apakah korupsi akan berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian disuatu Negara. Keterkaitan antara pajak, belanja modal dan korupsi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Untuk itu, penulis ingin menganalisis permasalahan tersebut lebih

jauh dalam sebuah penelitian yang berjudul “Dampak Korupsi, Pajak, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Seberapa besar dampak pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Seberapa besar dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
4. Seberapa besar dampak Korupsi, pajak dan belanja modal secara bersama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis dampak belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis dampak korupsi dan pajak secara bersama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bagi penulis, penelitian ini akan memberi gambaran yang jelas mengenai dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pemerintah dan instansi pengambil kebijakan terkait tulisan ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan baik dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan terkait pentingnya dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi pembaca dapat memberikan masukan-masukan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori endogen memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori pertumbuhan sebelumnya. Pada umumnya, teori-teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya hanya menekankan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, untuk memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka suatu negara membutuhkan investasi yang tinggi pula. Dana untuk membiayai investasi didapatkan dari tabungan. Oleh karena itu, kunci utama dari pertumbuhan ekonomi adalah terletak pada kemampuan suatu negara dalam mengakumulasikan tabungan domestik (*domestik saving*).

Pada teori pertumbuhan endogen, faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah K, L, teknologi, kewirausahaan, bahan baku dan material, selain itu ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar tukar internasional (*term of trade*) yang ada di dalam suatu Negara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dari penjelasan di atas terlihat perbedaan antara teori pertumbuhan neoklasik dengan teori endogen. Pada teori pertumbuhan endogen, peran kualitas tenaga kerja lebih penting dari pada kuantitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bukan hanya dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga kondisi kesehatan pekerjanya.

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan endogen mengklasifikasikan instrument pajak menjadi dua, yakni *distortionary taxation* dan *non-distortionary taxation*. Pajak yang menyebabkan distorsi pada akumulasi modal, seperti Pajak Penghasilan (PPH), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) akan secara permanen mengurangi pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Cukai, Bea Masuk, dan Pajak Ekspor hanya menyebabkan distorsi sementara terhadap pilihan konsumsi, sedangkan akumulasi modal tidak berubah. (Benos, 2009).

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan Neoklasik yang dikembangkan oleh Solow (1956) dan pengikutnya di dominasi oleh pemikiran mengenai pertumbuhan pendapatan per kapita jangka panjang dan perkembangan yang semakin meningkat. Teori ini lebih terfokus kepada proses pembentukan modal. Menurutnya, tingkat tabungan merupakan tambahan pembiayaan terhadap stok modal nasional.

Di dalam teori pertumbuhan ekonomi, dikenal dengan dua aliran pemikiran, yaitu: teori neoklasik dan teori modern. Pada teori neoklasik, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja (*Labor/L*) dan kapital (*capital/K*). Adanya tambahan K dan L dengan asumsi produktifitas masing-masing faktor produksi tetap, maka akan menambah output yang dihasilkan. Sedangkan perekonomian dengan rasio

K/L yang rendah, akan memiliki tambahan pendapatan modal yang tinggi. Bila sebagian pendapatan ditabung maka akan terjadi kenaikan dalam investasi, sehingga hal ini akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan Neoklasik dapat diuraikan ke dalam suatu fungsi produksi Cobb-Douglas, dimana output merupakan fungsi tenaga kerja dan modal, sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Persentase pertumbuhan output bisa lebih besar (*increasing return to scale*), bisa lebih kecil (*decreasing return to scale*), atau tetap (*constant return to scale*) dibanding persentase penambahan input K dan L.

Dalam teori ini, asumsi yang dipakai dalam model neoklasik adalah *constant return to scale*, adanya substitusi antara modal dengan tenaga kerja dan adanya penurunan dalam tambahan produktivitas. Peran teknologi dianggap konstan sehingga teori ini tidak mengenal adanya peningkatan produktivitas. Fungsi Cobb-Douglas yang dimaksud adalah :

$$Q = f (K , L)$$

Dimana :

Y = tingkat output

K = modal

L = tenaga kerja

Di dalam model neoklasik, teknologi merupakan variabel eksogen atau variabel teknologi dianggap tetap, maka di dalam teori ini tidak mengenal adanya peningkatan produktivitas. Kelemahan pada teori ini adalah, kurang bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam NICs (New Industry Countries) seperti Korea Selatan,

Taiwan, Hongkong, dan salah satu negara yang akan diteliti yaitu Singapura. Adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut menunjukkan pentingnya teknologi dalam peningkatan produktifitas. Jadi, bukan hanya input K dan L saja yang penting dalam produksi tetapi juga input teknologi. (Nawatmi, 2014)

2. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi. Alatas (dalam Semma, 2008:32), menandakan esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. “Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.”

Lembaga *Transparency international* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepadanya. Keuntungan pribadi yang dimaksud bukan hanya secara individu, tetapi juga terhadap suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga. Definisi ini menunjukkan korupsi yang terjadi pada tingkat birokrasi, dan tidak terjadi pada sektor swasta (Tika Widiastuti, 2008).

Sementara, Bank Dunia membatasi pengertian korupsi hanya pada *pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi*. Mazhar (dalam Semma, 2008:34) menjelaskan:

“Istilah Korupsi secara umum sebagai berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Ia lalu menambahkan bahwa dalam perkembangannya lebih akhir, dari beragam pengertian Korupsi, yakni *penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan public untuk kepentingan pribadi*.”

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah dorongan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk memperoleh sesuatu yang dilakukan dengan metode pencurian dan penipuan dalam menyalahgunakan kekuasaan/kedudukan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Menurut Shah dan Shacter (dalam Setiyono, 2013), kategori korupsi meliputi tiga jenis:

1. *Grand corruption* yaitu sejumlah besar sumber daya publik yang dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik.
2. *State or regulatory capture* yaitu lembaga publik dengan swasta memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kolusi.
3. *Bureaucratic or petty corruption* yaitu sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. *Bureaucratic or petty corruption* merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa dan sering terjadi pada titik pelayanan publik seperti layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, perizinan, ataupun sekolah. Sedangkan *grand corruption* dan *regulatory capture* biasanya dilakukan oleh para elite politik ataupun pejabat pemerintah senior dalam menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan – perusahaan nasional maupun internasional dengan cara merancang kebijakan atau perundang undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri.

UU No 20 Tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, serta gratifikasi.

Korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Motif melakukan korupsi secara politik yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, sedangkan secara ekonomi untuk mendapatkan akses lebih ke sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih.

Bentuk dan motif korupsi menurut Stueckelberger (dalam Tika Widiastuti, 2008), yaitu:

1. Korupsi kemiskinan (*corruption of poverty*) yang disebut juga sebagai korupsi kecil, yaitu korupsi yang berakar dalam kemiskinan. Contohnya apabila pegawai-pegawai pemerintah tidak mendapat gaji yang dapat mencukupi kehidupannya.
2. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*) atau yang disebut korupsi besar, yaitu berakar dari nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
3. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi untuk mempercepat urusan (*corruption of acceleration*) yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa, tanpa korupsi maka

memperolehnya tidak akan tepat waktu atau membutuhkan biaya administratif yang lebih besar.

Dalam penelitian ini korupsi sering terjadi pada titik pelayanan publik, penggunaan biaya infrastruktur, dan terhadap pajak daerah yang akan menjadi variabel di dalam penelitian ini.

b. Teori Atasan-Bawahan (*Principal Agent*)

Teori ini melihat relasi antara dua pihak dan tujuan serta insentif berbeda yang terjadi dalam situasi ekonomi yang tidak seimbang atau asimetris. Pihak pertama, atasan (*principal*), memiliki sebuah tujuan akhir yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan itu, atasan akan mendelegasikan pekerjaan ini pada bawahan (*agent*) dengan insentif atau kompensasi tertentu. Atasan dan bawahan disini tidak selalu identik dengan hirarki dalam perusahaan atau organisasi. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, pejabat publik dan anggota parlemen adalah bawahan sementara pemilih adalah atasan.

Dalam kondisi ideal, atasan bisa memonitor penuh kinerja bawahan, dan tujuan akhir yang ditetapkan atasakan akan tercapai tanpa deviasi. Tapi sering kali kondisi ideal ini tidak terjadi. Biaya untuk mengawasi bawahan setiap saat akan terlalu tinggi. Sementara itu, bawahan juga memiliki sejumlah kepentingan pribadi yang ingin ia penuhi. Di sinilah ruang untuk korupsi terbuka. Pihak ketiga bisa mendapat keuntungan dengan menawarkan sejumlah imbalan pada bawahan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang diinginkan atasan.

Klitgaard mengatakan, korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuatan (*monopoly of power*) ditambah dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa adanya kekuasaan yang memadai dari aparat pengawas, menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan korupsi, hal tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$C = M + D - A$$

Keterangan :

M = *Monopoly of power*

D = *Discretion of official*

A = *Accountability*

C = *Corruption*

Menurut Jack Bologne, korupsi terjadi karena hubungan empat komponen yaitu: *Greed, Opportunity, Needs, Exposes*.

1. *Greed*, terkait dengan keserakahan dan kerakusan oleh para pelaku korupsi. Tipe seperti ini merupakan tipe orang yang tidak pernah puas dengan keadaan dirinya, punya impian yang berlebihan.
2. *Oppottunity*, terkait dengan sistem yang memberikan kesempatan atau celah terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi, dapat menyebabkan seseorang bekerja asal-asalan. Orang gampang manipulasi angka. Bebas berlaku curang. Peluang korupsi terbuka lebar.
3. *Need*, berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai.
4. *Exposes*, berkaitan dengan hukuman yang rendah terhadap pelaku korupsi. Hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku (*Deterrence effect*).

c. Teori *Rent Seeking*

Dalam pengertiannya, *rent seeking* mempunyai dua pendekatan. Pendekatan pertama ialah teori *rent seeking* dari prespektif ekonomi klasik dan yang kedua ialah teori *rent seeking* dari prespektif ekonomi politik. Teori *rent seeking* pertama kali di perkenalkan oleh Anne O. Krueger pada tahun 1974. Pada saat itu Krueger membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, dimana kuota impor sendiri dimaknai sebagai perbedaan antara batas harga dan harga domestik . Menurut Little dalam Yustika (2012: 107), perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Dalam pandangan ekonomi klasik, pemburuan rente dimaknai secara netral, atau tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian atau dapat memberikan keuntungan dan dampak positif. Hal ini dimaknai netral karena pendapatan yang dimaksudkan yaitu pendapatan dari *rent seeking* ini sama dengan pendapatan yang diperoleh individu karena menanamkan modalnya atau menjual jasa dan tenaganya.

Sedangkan dalam pandangan ekonomi politik, *rent seeking* dimaknai negatif. Secara sederhana, korupsi telah dianggap sebagai salah satu bentuk perburuan rente (*rent seeking*). Hal ini dipandang sebagai sarana khusus oleh pihak swasta maupun pemerintah yang berusaha untuk mengejar kepentingan dalam kompetisi untuk perlakuan istimewa. Dalam makna korupsi yang mencakup peburuan rente ekonomi maka dapat dipahami

bahwa Korupsi yang meningkat akan menyebabkan suatu Negara tidak menggunakan sumberdaya alam secara maksimal yang berakibat pada turunnya pertumbuhan ekonomi.

Yustika, A. Erani (2012:107) mengatakan bahwa asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik ialah kelompok kepentingan ingin memaksimalkan keuntungan atau profit sebesar mungkin dengan meminimalkan upaya mereka untuk mencapai keuntungan tersebut. Pada saat ini, sumber daya ekonomi politik, seperti lobi akan dipakai untuk menggapai keuntungan tersebut. Lobi-lobi tersebut akan membuat pemerintah menjadi lambat dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan.

Semakin besarnya perluasan pemerintah menentukan alokasi kesejahteraan, maka semakin besar kesempatan bagi munculnya para pemburu rente. Aktor yang terlibat dalam pemburuan rente ialah dari pihak kelompok bisnis ataupun individu dan juga pihak yang berkaitan dengan pemerintah. Melihat pada era orde baru dimana adanya suatu “kedekatan” antara pengusaha dengan pemerintah, sehingga mudahnya perusahaan untuk berkembang pesat. Dalam hal ini, perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan dapat mencegah pesaing untuk masuk ke pasar. Ada tiga penjelasan mengenai *rent seeking behavior*. Pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada titik ini, munculnya perilaku mencari rente sangat besar. Kedua, setiap kelompok atau individu pasti akan

berupaya mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Implikasinya, keseimbangan ekonomi tidak akan dapat tercapai dalam jangka panjang karena adanya kelompok-kelompok penekan yang mencoba mendapatkan fasilitas. Ketiga, dalam pemerintahan sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal.

Dalam kajian ekonomi politik, menurut Deliarnov (2006:57), “laba” yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi juga disebut *rente*. Kegiatan ingin mendapatkan imbalan atau *rente* itu sendiri disebut dengan “*kalap rente*” atau “*rent seeking behavior*”. Seringkali kita menganggap bahwa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk kepentingan rakyat, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pasar, ataupun untuk membuat suatu kestabilan Negara. Tetapi kebanyakan kebijakan justru menjadi suatu alat untuk kepentingan kelompok-kelompok penekan (Deliarnov, 2006:57)

3. Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa tahun terakhir, banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan angka indeks korupsi untuk melihat hasilnya pada variable-variabel ekonomi yang lain. Beberapa hasil penelitian tersebut adalah:

- a) Korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur.
- b) Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum.
- c) Korupsi menurunkan produktivitas dari investasi publik dan infrastruktur suatu Negara, dan
- d) Korupsi menurunkan pendapatan pajak.

Menurut Mauro (1995) dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari berbagai sektor antara lain:

- a) Menurunkan tingkat investasi dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang signifikan. Di sebuah Negara yang korup, para investor menyadari bahwa suap dibutuhkan sebelum sebuah perusahaan berdiri. Setelah perusahaan berhasil berdiri, korupsi masih saja terus terjadi karena penguasa terus meminta bagiannya. Dengan demikian investor akan menganggap suap dan korupsi sebagai bagian dari pajak. Hal ini akan mengurangi insentif untuk berinvestasi.
- b) Alokasi yang salah atas sumber daya manusia yang berkualitas untuk bekerja pada sektor yang memiliki kemudahan dalam melakukan *rent-seeking*, dibandingkan di tempat yang benar-benar produktif
- c) Mengurangi efektifitas alur bantuan. Dengan adanya korupsi, alokasi dana bantuan bisa saja digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang tidak produktif dan sia-sia, akibatnya Negara-negara donor akan mengurangi niatnya untuk memberikan bantuan.
- d) Menurunkan penghasilan pajak. Pajak yang seharusnya masuk ke kas Negara bisa saja masuk ke kantong pribadi pihak-pihak tertentu akibat adanya korupsi.
- e) Menurunkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Adapun cara pandang dunia terhadap masalah korupsi pada saat sekarang ini telah mengalami perubahan drastis. Korupsi dipandang sebagai masalah dan penanganan korupsi mulai mendapat perhatian serius, seperti di

Indonesia sebuah lembaga penanganan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain telah mengeluarkan tindakan dalam menangani kasus serta pengaduan korupsi yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia. Bentuk tindakan lembaga pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan korupsi sehingga akan menghasilkan tatanan yang baik pada birokrasi pemerintahan serta memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Penerimaan Pajak

a. Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek dan obyek pajak (Rahmananta, 2011: 28). Sudut pandang ekonomi menilai pajak sebagai salah satu penerimaan Negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima Negara dari kontribusi masyarakat kepada Negara, diluar pendapatan dari sektor migas.

Pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara memiliki 2 fungsi (Mardiasmo, 2013:2), yakni fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan

fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak juga memiliki beberapa syarat pemungutan agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan dalam pemungutan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

b. Teori Peacock dan Wisman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiesman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

5. Hubungan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi suatu Negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu Negara maka semakin bagus tingkat perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi

merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznets dalam Purnamasari, 2009:11). Selain itu Bruckner (2011: 9) dalam penelitiannya menemukan bahwa kenaikan produk domestik bruto dalam suatu Negara dapat mempengaruhi penerimaan pajak Negara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

6. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Asset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Ardhani, 2011). Pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan

bahwa nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset sampai asset tersebut siap digunakan.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh asset tetap tersebut, yakni membangun sendiri, menukarkan dengan asset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

7. Hubungan Penerimaan Pajak dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar dalam “teori pertumbuhan mantap (*steady growth theory*)” yang merupakan pengembangan analisis Keynes, lebih menekankan peranan kunci perlunya penanaman modal dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut didukung teori pertumbuhan ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi bersumber utama dari modal. Modal atau *capital* sebagai faktor produksi pada pembangunan ekonomi bukan dalam bentuk uang (*money*) tetapi *real capital goods* (barang-

barang modal). Proses pengeluaran dana modal dalam pemerintah dikenal dengan istilah belanja modal (Halim dan Subiyanto, 2008:4-5).

Negara dalam membiayai pengeluaran belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya bersumber dari penerimaan pajak. Hubungan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, yaitu ”bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP/GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar pula”.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2013) yang membahas “Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia”, studi kasus mekanisme dugaan Korupsi APBD di pemerintahan Provinsi Banten. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode regresi data panel serta terdiri dari dua variabel bebas yakni Korupsi dan pencarian rente ekonomi serta satu variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa Korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pertumbuhan yang dicapai daerah-daerah seharusnya lebih tinggi daripada yang dicapainya sekarang. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan melakukan pemberantasan Korupsi di level daerah/nasional yang dimulai dengan menciptakan suatu system politik yang berbiaya rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nawatmi (2014:73) yang membahas “Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik”. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode data panel (*pooled data*) yang menggabungkan data *cross section* dan *time series* yang terdiri dari lima variabel bebas yakni Korupsi, investasi, pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan, dan populasi serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat.

Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut dapat disimpulkan Korupsi memiliki signifikansi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 12 negara di Asia Pasifik. Hasil analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa dari 12 negara yang dijadikan objek penelitian ternyata hanya lima Negara yang korupsinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dua Negara positif signifikan (Jepang dan Korea Selatan) dan sisanya Brunei Darusalam, Timor Leste dan Kamboja) negatif signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Parnawati (2010). Pada tahun 2010 melakukan penelitian tentang kausalitas penerimaan, belanja modal dan PDRB kabupaten/kota di Indonesia yang menggunakan metode penelitian analisis

kuantitatif serta bentuk umum model *vector autoregresif* dengan menggunakan data panel atas sampel 178 kabupaten/kota di Indonesia periode 2001-2008 dengan hasil bahwa peningkatan belanja modal dapat meningkatkan PDRB tetapi peningkatan PDRB tidak mempengaruhi peningkatan belanja modal.

Berdasarkan berbagai penelitian relevan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, bahwa Korupsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk membedakan penelitian penulis dengan berbagai penelitian terdahulu tersebut maka penulis menambahkan variabel belanja modal dan penerimaan pajak untuk menentukan pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Konseptual

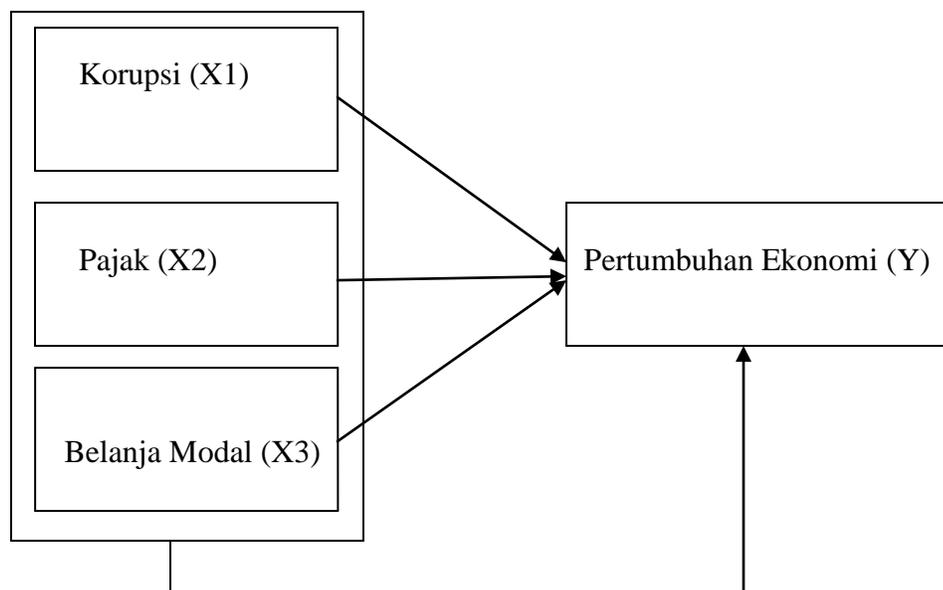
Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan, keterkaitan ataupun antara variable yang diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Korupsi, Pajak dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” digunakan beberapa variabel yang terdiri dari variabel terikat dan variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y) dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korupsi (X1), Pajak (X2) dan Belanja Modal (X3).

Bila korupsi pada tiap-tiap daerah di Indonesia meningkat maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan bergerak kearah yang cenderung akan merugikan, karena korupsi dapat menciptakan distorsi pasar serta menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya untuk

menjalankan bisnis yang pada akhirnya akan memperparah kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Apabila sistem birokrasi di tiap daerah memiliki kualitas yang baik maka korupsi dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh penerimaan di sektor pajak di dalam perekonomian di tiap-tiap daerah di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang berasal dari belanja modal daerah mempunyai dampak positif terhadap perekonomian yaitu melalui sarana dan prasarana publik. Oleh karena itu apabila semakin besar penerimaan pajak dan semakin besar juga belanja modal pemerintah di tiap-tiap daerah di Indonesia otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Berikut merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar variabel-variabel dalam penelitian ini:



Gambar 2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang ada, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut:

1. Korupsi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Korupsi, pajak dan belanja modal Modal mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien regresi parsial } \beta \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas yaitu Korupsi, pajak dan belanja modal terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Korupsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan korupsi tidak akan berdampak besar terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena pengambilan data untuk Korupsi menggunakan jumlah pengaduan kasus Korupsi antar provinsi dari tahun 2011-2015.
2. Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan pajak akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan pada sektor pajak dapat mengurangi konsumsi dan mengurangi investasi, dimana kedua variabel tersebut juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
3. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan belanja modal akan berdampak besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara Korupsi, pajak dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Tanpa pertumbuhan ekonomi bagaimana kehidupan bisa berlangsung dengan baik. Sementara itu, Korupsi bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau Korupsi sudah menjadi *grase of wheel* maka pemerintahan yang bersangkutan harus betul-betul bekerja keras untuk memberantas Korupsi. Karena Korupsi sudah menjadi budaya, maka penegakan hukum tidak bisa ditawar lagi, kalau memang pemerintah betul-betul mempunyai keinginan untuk memberantas Korupsi di Indonesia. Disamping itu, data yang dipakai dalam penelitian ini sangat terbatas. Jika nanti sudah ada data IPK (CPI) tahunan di setiap provinsi maka hasilnya diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari masing-masing provinsi.
2. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Artinya peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Dengan demikian, jika pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pengeluaran yang berpengaruh terhadap nilai komponen pengeluaran pemerintah, maka peningkatan pungutan pajak dapat berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, pungutan pajak berkolerasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka setiap kenaikan

pungutan pajak dapat meningkatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah diharapkan lebih mengoptimalkan Pajak untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan perekonomian. Maka pemerintah harus lebih berperan secara produktif dalam pengelolaan sektor pajak sehingga diharapkan akan dapat semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Belanja modal sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan secara berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran. Bagi pemerintah daerah agar lebih mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Alokasi belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah sebaiknya lebih didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik dan pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.
4. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami membahas berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, 17-32.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. *Statistik Indonesia Berbagai tahun (2011-2015)*. Jakarta : BPS (Badan Pusat Statistika)
- ,*Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia 2011-2015*. Jakarta : BPS (Badan Pusat Statistika)
- Citra, Veronica Apsari. 2001. *Hubungan antara Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kedari*. Skripsi S1 Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*, Jakarta : Erlangga
- Dewi Snf. 2002. “Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan, Investasi Domestik dan Foreign Direct Investment (11 Negara Asia Tahun 1995-2000)”. Tesis. FEUI.
- Gbewopo Attila. 2008. *Corruption, Taxation and Economic Group: Theory and Evidence*, CERDI, Etudes et Document, E 2008.218
- Gujarati, D., N & Porter, D.C., (2010), *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi Lima, Selemba Empat, Jakarta.
- Huntington Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press
- JAC C. Hackelman & Benjamin Powell, 2010, Corruption and The Institutional Environment for Growth, *JEL Clasification: D73, H10, 043, 057*
- Keith Blackburn, Niloy Bose & M. Emranul Haque. 2005. *Economic Discussion Paper EDP-0530*, The University of Manchester.
- Khair. 2014. “Analisis Pola Korupsi di Lembaga Pemerintahan Indonesia (Studi kasus putusan tindak pidana Korupsi di lembaga pemerintah tahun 2005-2013)”. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2016), *Laporan tahunan KPK 2016*, diakses tanggal 20 Februari 2017, pukul 2.17 pm.